

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis pada data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 menunjukkan varians Pendapatan mengalami fluktuatif tetapi cenderung membaik, pertumbuhan pendapatan Kapupaten Manggarai menunjukkan kinerja yang kurang baik (tidak stabil). Untuk rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan menunjukkan hasil yang rendah, rasio efektifitas dan rasio efisien dari pendapatan Kabupaten Manggarai menunjukkan hasil yang sangat efektif dan efisien dan ketergantungan keuangan daerah masih sangat tinggi. Dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya mampu memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan masih bergantung kepada pemerintah pusat pada penerimaan pendapatan daerah.
- b. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 menunjukkan varians belanja dan pertumbuhan belanja memiliki kinerja yang baik, rasio efisiensi belanja daerah memiliki kinerja yang efisien, rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja memiliki kinerja yang baik, pertumbuhan belanja kurang baik dan belanja modal tidak baik. Secara umum menunjukan kinerja pengelolaan belanja Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 memiliki kinerja yang baik.

- c. Kinerja Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 sehat karena rata-rata SiLPA dibawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai tidak memiliki masalah pada manajemen keuangan daerah. Kinerja pendapatan daerah yang besar masih kurang dapat memaksimalkan belanja daerah karena pada belanja langsung dan tidak langsung belanja masih kurang memaksimalkan belanja langsung yang berkaitan dengan belanja Modal.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Manggarai lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir dan pemerintah Kabupaten Manggarai juga diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan. Sedangkan belanja daerah diharapkan pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengurangi belanja daerah supaya dapat mengimbangi pertumbuhan pendapatan, dan untuk belanja modal diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai meningkatkan belanja langsung yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan ada penambahan periode yang semakin panjang agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Memperluas ruang lingkup wilayah penelitian agar mampu membandingkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim.(2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- (2008), *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- (2009). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- (2014), *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul, H., & Muhammad, S. K. (2012). *Teori, Konsep dan Aplikasi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Manggarai.
- (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Manggarai.
- (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Manggarai.
- Batafor, Gregorius Gehi. 2011. “Evaluasi Kinerja dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lambata, Propinsi NTT”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Biduri, Sarwenda. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Brian Sagay, 2013, Analisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Skripsi.
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti.(2011). *Akuntansi Sektor Publik* (2ed). Jakarta : Salemba Empat.
- Heri Faisal Harahap (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Skripsi

- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mandey dan Rotinsulu, 2015, Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. Skripsi.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Nenda Marliani (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. Skripsi
- Rahmiyati, Nekky. 2009. Pengaruh Anggaran Daerah pada Pembangunan Di Jawa Timur
- Sandy candra saputra, dkk, (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2014. Skripsi
- Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sularso, havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011.
- Susanto, 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2015. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Wikipedia. 2022. *Laporan Keuangan*. diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

Peraturan Pemerintah dan Undang undang

- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.